

KERJASAMA PEMPROV KALTIM DAN NORTHERN TERRITORY DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASIONAL MELALUI PROGRAM VOCATIONAL EDUCATION TRAINING (VET) TAHUN 2010

Maulana Yusuf¹
Nim. 1302045218

Abstract

Vocational Education And Training Institutions and the industry meet the demands of the labour market. Vocational education and training institutions, such as polytechnics, emerged as one of the main training providers and logical workforce necessary to revitalize and maintain the competitiveness of the industry and business of this nation. The purpose of this research was to analyze the cooperation of Indonesia and the Government of the Northern Territory in the field of education and training through the Vocational program and Polytechnic Education Training (VET) in 2010 especially in East Kalimantan. This research uses qualitative research methods. In this study the author uses bilateral relations that are used to perform the analysis in this study. Data analysis techniques used are qualitative content analysis. The results of this research show that the existence of vocational education and training institutions and the industry to improve the education system still hasn't been fullest in addressing employment issues that existed in East Kalimantan, with a wide range of demands such as global demands, the demands of the industry needs will be the quality of the manpower Polytechnic graduates, and demands a polytechnic education program management is still minimal.

Keyword: *Vocational Education Training (VET), Education System, Employment.*

Pendahuluan

Meningkatnya tuntutan persaingan globalisasi telah memfokuskan kebijakan untuk memungkinkan perpaduan antara kualitas dan keahlian dalam sumber daya manusia untuk menciptakan, menyebarkan dan mengelola pengetahuan di Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Northern Territory telah memulai kerjasama yang sebelumnya kerjasama ini dimulai tahun 2000, dan kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2010 yang dirancang untuk mengembangkan hubungan yang lebih erat antara Kalimantan Timur dengan Northern Territory dan Pemerintah Northern Territory pun tetap mendukung Pemerintah Kaltim terutama

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yusuf.encup@yahoo.co.id

dalam hal pembangunan. Kedua yurisdiksi tersebut telah bekerjasama pada berbagai program yang saling menguntungkan. Kedua yurisdiksi tersebut telah menjalin hubungan kerjasama yang baik demi mengembangkan hubungan yang lebih erat dalam berbagai bidang. Alasan utama Pemerintah Provinsi Kaltim bekerjasama dengan Pemerintah Northern Territory karena adanya kerjasama sebelumnya pada tahun 2000, dan juga pemerintah provinsi kaltim ingin mengembangkan kembali kerjasama ini pada tahun 2010, sekaligus untuk membangun kembali kemitraan antara pemerintah Northern Territory dengan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Pemerintah Provinsi Kaltim memfokuskan sebuah kerjasama dengan Northern Territory melalui pendidikan dan pelatihan vokasional (*Vocational Education Training/VET*). Indonesia khususnya kaltim mengusulkan kerjasama VET pada beberapa sektor, yaitu pendidikan, pertanian, industri, kesehatan, pariwisata dan hospitality dengan jenjang pendidikan setingkat Sekolah Menengah Kejuruan dan Diploma. Tujuan utama Kerjasama ini nantinya diharapkan dapat memperkuat sumber daya manusia (SDM). (*RI Fokuskan Pada Kerja Sama Vokasi*, Di akses tanggal 4 April 2017). Program *Vocational Educational Training* (VET) atau Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar memiliki kemampuan bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan. Pendidikan kejuruan adalah program pendidikan yang secara langsung berkaitan dengan penyiapan seseorang untuk satu pekerjaan tertentu atau untuk persiapan tambahan karir seseorang. (Pengembangan sumber daya manusia indonesia melalui sekolah menengah kejuruan, Wardiman, D. (1998).

Pemerintah Kalimantan Timur membuat kesepakatan bersama dengan Pemerintah Northern Territory guna memajukan pendidikan di Kalimantan Timur dan hal tersebut disambut baik oleh Pemerintah Northern Territory melalui program-program yang telah disepakati bersama yang dimuat dalam *MOU Joint Communiqué Progress against the Joint Statement of Cooperation between Kalimantan Timur & Northern Territory*. Dengan adanya kerjasama pendidikan kejuruan seperti Sekolah Menengah Kejuruan dan Politeknik di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur diharapkan mampu menghasilkan tenaga terampil yang berkompentensi tinggi akan menarik tumbuhnya sektor industri yang akan membuka peluang kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran secara nasional. (www.kemendag.go.id, diakses pada 4 april 2017)

Pengembangan keterampilan komunikasi, keterampilan khusus untuk orang-orang yang terlibat dalam kemitraan yang bisa menjadi mitra yang dianggap sebagai tantangan bagi perusahaan industri dan penyedia VET di Kalimantan Timur dalam mengelola dan memelihara kemitraan pelatihan dalam tekanan globalisasi. Penilaian kebutuhan pelatihan juga menjadi tak terelakkan dalam membangun kemitraan, karena lembaga VET tidak selalu menangani program pelatihan namun juga bertindak sebagai agen konsultasi. Kedua penyedia VET dan mitra industri mereka menekankan nilai memiliki tingkat saling percaya yang tinggi. Ini menjadi pendorong utama dalam menjaga kemitraan dan kerjasama antara pemerintah Kalimantan Timur dengan pemerintah Northern Territory. Alasan utama untuk membentuk kemitraan yang diidentifikasi oleh kedua mitra adalah meningkatkan keterampilan karyawan, melatih kembali karyawan, pertukaran pengetahuan dan meningkatkan kualitas produk antara

Kalimantan Timur maupun pemerintah Northern Territory. Kriteria untuk kemitraan berkualitas berpusat pada kemampuan penyedia VET agar inovatif, fleksibel dan responsif. Ini juga bergantung pada membangun kepercayaan, membangun kebutuhan bersama, menetapkan tujuan, mengembangkan pola pikir bersama yang berkaitan dengan layanan pelanggan dan perbaikan terus-menerus, dan kepemimpinan organisasi yang kuat dan efektif. Kekuatan utama keempat kemitraan ini, yang dipaparkan selama penelitian ini, adalah fakta bahwa kedua penyedia VET dan mitra industri mereka berkembang dalam lingkungan kolaboratif bukan satu kompetisi. (Helmy Abdullah, Juni 2014) Dengan demikian, peneliti ini berpendapat bahwa karena mitra ini 'hidup' di lingkungan kolaboratif dan telah melakukan kerjasama yang berhasil antara Pemerintah Kalimantan Timur dengan Pemerintah Northern Territory.

Industri pada umumnya menyadari akan permasalahan penyediaan dan kualitas tenaga kerja akan tetapi, tidak adanya kesepakatan akan akar penyebab dari permasalahan kualitas tenaga kerja dan bagaimana mengatasinya. Selain kesediaan beberapa industri untuk memberi pelatihan bagi para pekerjanya baik secara sendiri maupun melalui lembaga pendidikan, dalam penelitian ini tidak terdapat dari pihak industri strategi lain yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pekerja potensial yang pada gilirannya meningkatkan kualitas tenaga kerja yang tersedia di Kalimantan Timur. Situasi naik turunnya industri akibat situasi ekonomi, disebutkan memberi dampak besar terhadap penempatan kerja. Masalah lain di Kalimantan Timur adalah permasalahan Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah lulusan politeknik. Akhirnya meskipun pihak industri mengemukakan tentang buruknya etos kerja dan motifasi kerja pada para pekerja, namun tidak terungkap dari kalangan industri tentang bagaimana mengatasinya ini dapat diartikan bahwasanya menjadi tanggung jawab pihak politeknik sebagai penyedia tenaga kerja untuk mencari tahu penyebab menurunnya kualitas kinerja para lulusannya baik dalam keterampilan kerja maupun dalam hal sikap kerja serta bagaimana mengatasinya.

Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana Kerjasama Indonesia Dan Northern Territory Dalam Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Vokasional Melalui Program *Vocational Education Training* (VET) Tahun 2010 Di Kalimantan Timur.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Teori Paradiplomacy

Paradiplomacy secara relatif masih merupakan fenomena baru dalam kajian hubungan internasional. Paradiplomacy adalah aktivitas ekstra-yurisdiksi yang dilakukan oleh entitas politik yang ditujukan kepada entitas politik asing. Ekstra-yurisdiksi dimaksudkan bahwa masing-masing entitas politik mempunyai kapasitas yurisdiksi atau kompetensi yang berbeda-beda dalam membuat hukum, membangun proses administratif, memfasilitasi pemasukan modal, merancang edukasi, dan mendukung perkembangan iklim kondusif kepada pertumbuhan ekonomi.

Ekstra-yurisdiksi juga berarti aktivitas yang melebihi kapasitas *de jure* suatu entitas politik dan melakukan ekspansi *de facto* dari entitas politik yang dapat diartikan bahwa paradiplomasi harus menarget entitas politik asing. Misalnya entitas sub-nasional yang berpartisipasi dalam sebuah kebijakan internasional akan dianggap

sebagai paradiplomasi asalkan menarget entitas politik asing. Namun, jika entitas sub-nasional melakukan ekspansi kekuatan *de facto* untuk mengembangkan ekonomi dengan cara meminta bantuan dana kepada aktor bisnis didalam teritorinya, maka ini bukan paradiplomasi walaupun metode yang digunakan adalah ekstra-yurisdiksi. Ada juga perbedaan paradiplomasi dengan diplomasi publik, jika yang disebut pertama menarget entitas politik asing, maka yang terakhir disebut menarget lebih kepada publik asing dengan arti yang umum dan juga diplomasi publik tidak dilakukan secara ekstra-yurisdiksi oleh pelakunya. (*Paradiplomacy, Centre Maurits Coppieters et al. 2014*)

Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas *Sub-State*, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. (Stefan Wolff, '*Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges*', hal. 1-2, dan 13, University of Nottingham, 2009)

Istilah *Paradiplomacy* pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah *Parallel Diplomacy* menjadi *Paradiplomacy*, yang mengacu pada makna *The Foreign Policy Of Non-Central Governments*, menurut Aldecoa, Keating dan Boyer. Istilah lain yang pernah dilontarkan oleh Ivo Duchacek untuk konsep ini adalah *Micro-Diplomacy*. (David Crikemans, '*Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?*', hal. 34, *University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy, Belgium*, Juli 2008)

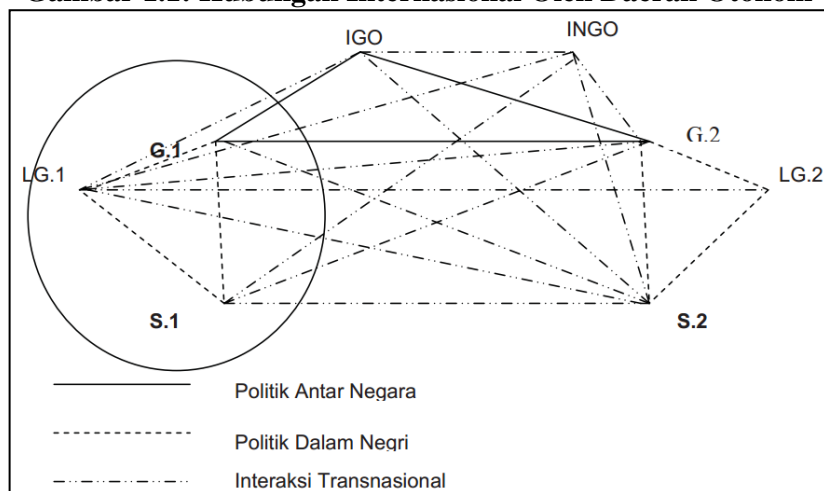
Dalam konteks ini, aktor Sub-Negara diperankan oleh pemerintahan regional atau lokal yang secara tradisional bertindak sebagai aktor dalam negeri. Namun, pada era transnasional, pemerintah regional juga melakukan interaksi yang melintasi batas-batas negara, dan dalam taraf tertentu, mereka juga menyusun kebijakan kerjasama luar negerinya, yang dalam banyak kasus, tidak selalu berkonsultasi secara baik dengan pemerintah pusat. Fenomena pemerintah regional membangun hubungan internasional ini sangat terlihat di Negara-Negara industri maju di Barat, (André Lecours, '*Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World*', hal. 1, *Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael*', December 2008) seperti di Flander-Belgia, Catalonia-Spanyol, the Basque Country, Quebec-Canada. Terkait bangkitnya geliat partisipasi pemerintah lokal atau daerah otonom untuk berkiprah secara internasional ini, Stefan Wolff, lebih lanjut mengatakan;

"The participation of autonomous entities in the international arena indicates that the very notion of sovereignty has fundamentally changed. It can no longer be conceptualised in the exclusive state-only terms of the Westphalian system. For states to enjoy sovereignty to its fullest possible extent and for their populations to benefit from it, states have to share their powers with other players in the international arena. The example of paradiplomacy, however, also clearly indicates that states remain the ultimate bearers of sovereignty: paradiplomacy is, at best, a competence devolved to autonomous entities and hence it is the sovereign state that decides how much of its power it shares."(Stefan Wolf, '*Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges*', hal. 1-2, dan 13, University of Nottingham, 2009)"

Dengan terlibatnya pemerintah lokal dalam melaksanakan hubungan dengan pihak luar negeri, maka itu mengindikasikan bahwa pemikiran paling mendasar tentang kedaulatan Negara telah berubah secara fundamental. Sistem *Westphalia* yang meletakkan kedaulatan secara penuh pada pemerintah pusat, harus membagi kedaulatan dengan pemerintah daerah dalam aktivitas internasionalnya. Seberapa besar pembagian kedaulatan itu, tentu akan berbeda-beda tiap Negara.

Jika Pemerintah Lokal atau *Local Government* (LG) dimasukkan ke dalam pola hubungan transnasional yang dikemukakan oleh Keohane pada Gambar 1.1 yang terdiri atas *Government* (G), *Society* (S), dan *Inter-Governmental Organization* (IGO), lalu dikombinasikan dengan *International Non-Governmental Organization* (INGO), sebagaimana dilakukan oleh Mohtar Mas'ood, (Dr. Mohtar Mas'ood, '*Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*', hal. 271-274, LP3ES, Jakarta, Tahun 1990) maka pola hubungan internasional oleh daerah otonom dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1: Hubungan Internasional Oleh Daerah Otonom



Sumber : Mohtar Mas'ood Ilmu Hubungan Internasional hal. 271-274

Pada gambar 1.1 tergambar jelas bahwa daerah otonom menjadi titik temu 2 jenis garis, yakni, pertama, jenis garis yang menunjukkan interaksi semua Urusan Dalam Negeri (dengan pemerintah pusat dan masyarakat dalam negeri), bertemu dengan garis kedua, yakni jenis garis yang menggambarkan interaksi dalam segala Urusan Luar Negeri dengan pihak asing. Di sinilah, daerah otonom berada pada wilayah pertemuan garis antara pihak asing dengan pemerintah pusat. Titik taut Daerah Otonom dalam hubungan antar bangsa adalah pada perannya selaku aktor hubungan internasional. Oleh karena itu, arti penting daerah otonom dalam studi hubungan internasional dan secara relatif mandiri daerah otonom dapat melakukan hubungan internasional secara langsung dengan pihak asing, baik yang bersifat antar pemerintah maupun kerjasama dengan Non Pemerintah Asing, di mana aktor-aktor non-pemerintah dapat secara leluasa membagi hubungan dengan tanpa melibatkan pemerintah pusat. Aktor-aktor ini adalah kelompok-kelompok masyarakat dan suku-suku (*Societies*), kelompok kepentingan ekonomi, perusahaan-perusahaan multinasional dan bahkan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah suatu negara.

Bagian-bagian birokrasi pemerintah ini kadang-kadang bertindak dengan berinteraksi langsung dengan pihak asing tanpa sepengetahuan pemerintah pusat.

Studi yang dilakukan oleh David Crikemans menunjukkan bahwa di Negara-negara maju, hubungan pusat dan daerah dalam membagi kedaulatan di bidang hubungan internasional ini ada 2 (dua) kecenderungan, yakni ada yang bersifat kooperatif dan ada pula yang konfliktual. Crikemans menyebutkan karakteristik dari paradiplomasi yakni, yang pertama adalah *Ius Legationis* atau representasi politik di luar negeri. Kedua adalah *Ius Tractandi* atau kekuatan dan kewenangan membuat perjanjian. Ketiga adalah perjanjian-perjanjian yang memiliki sifat formal tertentu. Seperti contohnya yaitu deklarasi atau pernyataan kehendak atau perjanjian kerjasama, kontrak transnasional, dan kerjasama kebudayaan. Kemudian yang keempat adalah pengembangan program bantuan dan berbagi pengetahuan dengan negara lain. Seperti contohnya program-program bilateral, program kerjasama lintas-batas, program yang ingin membawa masyarakat wilayah sendiri dan wilayah lain menjadi bersama, serta program-program multilateral. Yang kelima adalah bentuk lain partisipasi dalam kerangka kerja multilateral dan organisasi. Seperti contohnya mengamati dan partisipatif dalam komite-komite, pembentukan atau partisipasi dengan dana didalam organisasi multilateral, dan menjadi anggota penghubung dalam organisasi multilateral. Yang keenam adalah partisipasi dalam jaringan formal atau informal bentuk lain. Ketujuh adalah mengembangkan diplomasi publik, domestik, maupun internasional.

Fenomena globalisasi yang semakin tidak mengenal ruang dan waktu ini bahkan melahirkan cara dan bentuk diplomasi yang baru. Globalisasi perlahan menggeser diplomasi tradisional yang cenderung terlihat sangat kaku dan dijalankan oleh sekelompok orang yang memang terlatih atau yang disebut dengan diplomat. Bahkan globalisasi juga telah membuat timbulnya aktor-aktor dibawah pemerintahan negara yang berperan penting dalam interaksi hubungan internasional. Hal ini menjadi cikal bakal lahirnya diplomasi yang modern yang sangat fleksibel. Oleh karena itu, Ivo Duchacek telah mencermati fenomena makin berperannya pemerintah sub-nasional dalam hubungan internasional dimana pemerintah sub-nasional melakukan apa yang disebut dengan paradiplomasi. Petrovski menambahkan bahwa fenomena tentang makin berkurangnya peranan pemerintah nasional dalam hubungan internasional dapat disebut dengan fenomena *Degovernmentalization*.

Dalam hal ini, fenomena globalisasi meningkatkan kompleksitas tatanan dan aktor hubungan internasional yang disertai dengan semakin intensnya peran aktor-aktor *sub-state* maupun *non-state*. Hal ini berkaitan dengan paradiplomasi yang munculnya dari *Self-Determination* entitas-entitas tertentu dalam suatu negara, seperti kelompok etnis, provinsi, kota, maupun kelompok *Sub-State* lainnya. Diplomasi ini pada umumnya dilakukan dengan menjalin hubungan perniagaan, investasi, kooperasi untuk mempromosikan kepentingan dan tujuan kelompok tersebut. Otonomi tersebut dapat disebut sebagai suatu internasionalisasi atas isu-isu domestik yang menuntut adanya intervensi dan atensi internasional atas problema domestik atau *Non-State*. Manajemen konflik dengan paradiplomasi memiliki berbagai potensi positif dan negatif.

Keunggulannya adalah entitas-entitas lokal dapat lebih berpartisipasi dalam lingkup internasional. Paradiplomasi dapat membantu komunitas tertentu untuk mendapatkan keanggotaan sebuah organisasi internasional. Dengan keanggotaan ini, entitas-entitas tersebut memiliki hak untuk perumusan kebijakan substantif sebagai bentuk ekspresi dari kelompok tersebut, meliputi perlindungan kebudayaan, pengembangan pendidikan, praktik keagamaan, dan sebagainya. (Wolff, Stefan. 2007. "Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges" dalam *The Bologna Center Journal of International Affairs*. Vol. 10 (Spring 2007). Universitas Nottingham [online]. <http://www.stefanwolff.com/files/Paradiplomacy.pdf>, Diakses pada tanggal 14 Oktober 2015.)

Paradiplomasi juga dapat meningkatkan hubungan dan relasi kerjasama ekonomi maupun politik secara global dan juga sebagai demonstrasi atas independennya suatu kelompok. Namun, kelemahannya adalah jika tidak terdapat keselarasan dalam koordinasi paradiplomasi ini dengan kebijakan sentral yang ditetapkan pemerintah pusat, maka akan menjadi tantangan tersendiri bagi kedaulatan negara yang bersangkutan, terutama jika itu berkaitan dengan citra negara tersebut di mata internasional.

Paradiplomasi yang dipraktekkan oleh Flanders, Wallonia, dan Bavaria cenderung kooperatif dengan pemerintah pusat, meski masih ada kesan kompetitif, sedangkan interaksi luar negeri yang dilaksanakan oleh Scotland dan Catalonia cenderung konfliktual. Ada 4 (empat) pandangan mengenai sebab terjadinya kecenderungan konflik atau kooperatifnya antara hubungan pusat dan daerah dalam urusan luar negeri ini, yakni, pertama, perbedaan paham politik mayoritas di pemerintahan regional dengan pemerintah pusat akan cenderung untuk konflik, atau sebaliknya, jika kekuatan politik mayoritas di pusat dan di daerah sama, maka akan cenderung kooperatif. Kedua, keberadaan para aktivis pergerakan nasionalis (radikal) di daerah akan cenderung menciptakan konflik dengan pemerintah pusat dalam hubungan luar negerinya, atau sebaliknya, ketiadaan para aktivis radikal ini akan di daerah akan mendorong kearah kooperatif. Ketiga, pemerintah regional yang memiliki kekuatan ekonomi yang tinggi/kokoh akan cenderung berani untuk berseberangan secara konfliktual dengan pemerintah pusat, atau sebaliknya, pemerintah daerah yang miskin akan sangat diuntungkan dengan berkooperasi dengan pemerintah pusat untuk meminta asistensinya. Keempat, keberadaan institusi formal yang melaksanakan fungsi koordinasi dan konsultasi antara pusat dan daerah untuk urusan luar negeri akan berpengaruh terhadap terjadinya hubungan yang konfliktual atau pun koordinatif, meskipun yang terakhir ini tampak tidak konsisten di Eropa. (Criekemans, hal. 13-14)

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Dimana penulis menggambarkan Kerjasama Pemprov Kaltim Dan Northern Territory Dalam Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Vokasional Melalui Program Vocational Education Training (VET) Tahun 2010. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil browsing data melalui jaringan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Telaah Pustaka. Teknik analisis yang digunakan teknik

analisis Data Kualitatif Analisis yaitu penulis menganalisis data sekunder yang kemudian menggunakan teori dan konsep untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti oleh penulis yaitu analisis Kerjasama Pemprov Kaltim Dan Northern Territory Dalam Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Vokasional Melalui Program Vocational Education Training (VET) Tahun 2010.

Hasil Penelitian

Analisis Paradiplomasi Kaltim dengan Northern Territory

Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Northern Territory dalam bidang pendidikan kejuruan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, merangsang pembangunan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Pendidikan kejuruan, pelatihan dan industri menjadi solusi untuk serangkaian tantangan global yang komprehensif.

Hubungan antara Kalimantan Timur dan Northern Territory dalam bidang pendidikan menjadi wadah untuk meningkatkan hubungan baik antar kedua mitra tersebut. Pendidikan merupakan sektor yang lebih netral dan lebih mudah untuk melakukan kerjasama ini. Kaltim dan Northern Territory merupakan mitra yang baik dan sudah cukup lama menjalankan kerjasama dalam berbagai bidang.

Faktor pendorong yang mempengaruhi penelitian ini adalah dampak globalisasi dan berbagai faktor lain yang berkaitan dengan ekonomi Kalimantan Timur untuk mengembangkan angkatan kerja yang terampil. Teori *Paradiplomacy* digunakan untuk menganalisis kerjasama Pemprov Kalimantan Timur dengan Northern Territory dengan tujuan untuk mempermudah analisis kerjasama antara Negara dengan *Sub-State* yaitu pemerintah *Regional* atau pemerintah lokal yang bertindak sebagai aktor dalam negeri. Teori *Paradiplomacy* memberikan kemudahan dengan memberikan Ekstra-yurisdiksi juga berarti aktivitas yang melebihi kapasitas *de jure* suatu entitas politik dan melakukan ekspansi *de facto* dari entitas politik.

Paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur dengan pemerintah Northern Territory merupakan pendekatan untuk meningkatkan kerjasama membangun kestabilan kawasan, dan juga untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan pelatihan kejuruan dalam bentuk *Vocational Education Training*. Pentingnya membangun hubungan kerjasama ini membuat tingkat kepercayaan untuk membangun kestabilan kawasan semakin meningkat, dan juga dapat memberikan keuntungan diantara keduanya.

Kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dengan Pemerintah Northern Territory guna memajukan pendidikan dan hal tersebut disambut baik oleh Pemerintah Northern Territory melalui program-program yang telah disepakati bersama yang dimuat dalam MOU *Joint Communiqué Progress against the Joint Statement of Cooperation between Kalimantan Timur & Northern Territory* pada Tahun 2010 Dalam Bidang *Vocational Education Training*.

Dalam perdebatan internasional tentang pendidikan, VET dianggap oleh spesialis pembangunan Sumber Daya Manusia dan sebagai tempat untuk menjadi alat pertumbuhan modal manusia yang spesifik yang dapat berguna untuk meningkatkan

kemajuan sosial ekonomi. Selanjutnya, dalam pengembangan modal manusia, kontribusi VET dianggap mampu untuk meningkatkan produktivitas individu dan perusahaan untuk penguatan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kalimantan Timur bekerjasama dengan Northern Territory bertujuan untuk menghasilkan tenaga terampil yang berkompentensi tinggi sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Dampak Paradiplomasi Kaltim dengan Northern Territory

Dampak Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Northern Territory dalam bidang pendidikan dan pelatihan vokasional melalui program *Vocational Education Training (VET)* Tahun 2010 dapat dilihat dari aspek Politik, Keamanan, Sosial, Budaya, dan Ekonomi, antara lain:

1. Dampak kerjasama pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan Northern Territory terhadap bidang politik dan keamanan adalah meningkatkan stabilitas keamanan kawasan yaitu dilihat dari indikator adanya peningkatan stabilitas kemandirian kawasan, minimnya konflik diantara keduanya setelah adanya peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan.
2. Dampak kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Northern Territory terhadap aspek sosial, budaya adalah meningkatkan perasaan untuk saling memahami budaya (*Cultural Understanding*), yaitu dilihat dari adanya peningkatan kegiatan kerjasama diantara keduanya dalam bidang sosial (kegiatan sosial kemasyarakatan), kesenian, dan kebudayaan.
3. Dampak kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Northern Territory terhadap aspek ekonomi adalah terdiri dari dampak langsung dan dampak tidak langsung (*Multiplyer Effect*). Dampak langsung adalah adanya peningkatan nilai ekonomi dari aktifitas layanan pendidikan diantara keduanya. Dampak tidak langsung (*Multiplyer Effect*) dari peningkatan kegiatan perdagangan diantara keduanya.

Analisis Persaingan Global

Persaingan Ekonomi Global yang terus berlanjut dan ketidakpastian di pasar tenaga kerja memerlukan penataan ulang dan penyesuaian kembali struktur ekonomi dan model kerja ekonomi yang konstan di Kalimantan Timur. Bentuk persaingan global seperti persaingan *Skill* dalam Bidang Pendidikan, Persaingan Tenaga Kerja, Persaingan Ekonomi, dan Persaingan Industri.

Persaingan Global menuntut Kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memenuhi permintaan akan keterampilan dan merencanakan pengembangan angkatan kerja dalam jangka panjang menjadi prioritas utama. Kebutuhan angkatan kerja yang berkualitas menjadi tuntutan utama dalam menghadapi persaingan global, dan lulusan pendidikan tinggi yang mempunyai *Skill* dan keterampilan yang mampu mengatasi berbagai masalah dalam menghadapi persaingan global juga menjadi tugas utama bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pembentukan keterampilan menjadi pusat kebijakan ekonomi. Faktor Human Kapital dan pelajar VET sebagai aset manusia atau komponen produksi yang memberi nilai

tambah VET yang selanjutnya menggantikan peran sosial dan pendidikan VET di Kalimantan Timur. Dampak Globalisasi, pengembangan modal manusia dan kebijakan nasional pendidikan kejuruan dan pelatihan di Kalimantan Timur menjadi sektor utama. Globalisasi memiliki pengaruh besar dalam pengembangan VET di Kalimantan Timur, yang membuat pemerintah menghadapi isu-isu besar untuk memberikan pendanaan berkelanjutan bagi pengembangan kelembagaan VET di Kalimantan Timur. Alasan utama untuk membentuk kerjasama yang diidentifikasi oleh kedua mitra adalah meningkatkan keterampilan karyawan, melatih kembali karyawan, pertukaran pengetahuan dan meningkatkan kualitas produk antara Kalimantan Timur maupun pemerintah Northern Territory. Kriteria untuk kemitraan berkualitas berpusat pada kemampuan penyedia VET agar inovatif, fleksibel dan responsif.

Dampak Positif Tingkat Kesejahteraan Kaltim

Analisis Tingkat Kesejahteraan di Kalimantan timur diukur dari beberapa indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Ketimpangan, dan Kondisi Ketenagakerjaan yang berada di Kalimantan Timur.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia di Kaltim selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, pertumbuhan IPM Provinsi Kaltim pada tahun 2016 mencapai 0,57 persen dengan indeks mencapai 74 persen. IPM provinsi Kaltim dan mayoritas Kab/Kota di Kaltim tercatat pada kategori tinggi (IPM > 70), hanya terdapat 3 kabupaten yang memiliki IPM dibawah 70 persen yaitu Kutai Barat, Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu. Kenaikan IPM tertinggi tercatat di Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, masing-masing 1,01 persen dan 1,00 persen. Kemajuan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara didorong oleh dimensi pendidikan dan kesehatan, sementara Kabupaten Paser dikarenakan perbaikan standar hidup layak dan juga pendidikan. (BPS Provinsi Kalimantan Timur, diakses dari <http://kaltim.bps.go.id/IPM-kab/kota-di-Kaltim-tahun-2010-2016>, pada tanggal 2 Januari 2018.)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim terus mengalami peningkatan. Dalam tujuh tahun terakhir, tepatnya 2010 hingga 2017, IPM Kaltim meningkat dari 71,31 di 2010, menjadi 75,12 di 2017. Rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,75 point. Pertumbuhan IPM Kaltim per tahun, yakni tahun 2010 sebesar 71,31 persen yang diperoleh dari komponen Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) 72,89 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) 11,87 tahun, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 8,56 tahun, dan pengeluaran per kapita Rp 10.790.000. Kemudian IPM tahun 2011 naik menjadi 72,02 persen yang diperoleh dari komponen UHH selama 72,10 tahun, HLS selama 12,06 tahun, RLS selama 8,79 tahun, dan pengeluaran per penduduk (kapita) senilai Rp 10.927.000. Pada 2012 IPM Kaltim kembali naik menjadi 72,62 persen yang berasal dari komponen UHH selama 73,32 tahun, HLS selama 12,46 tahun, RLS selama 8,83 tahun, dan pengeluaran per kapita disesuaikan senilai Rp 10.944.000. Sedangkan di 2013, IPM kembali mengalami peningkatan menjadi 73,21 persen yang diperoleh dari komponen UHH 73,52 tahun, HLS 12,85 tahun, RLS 8,87 tahun, pengeluaran per kapita disesuaikan senilai Rp 10.981.00. Kondisi serupa kembali terjadi di

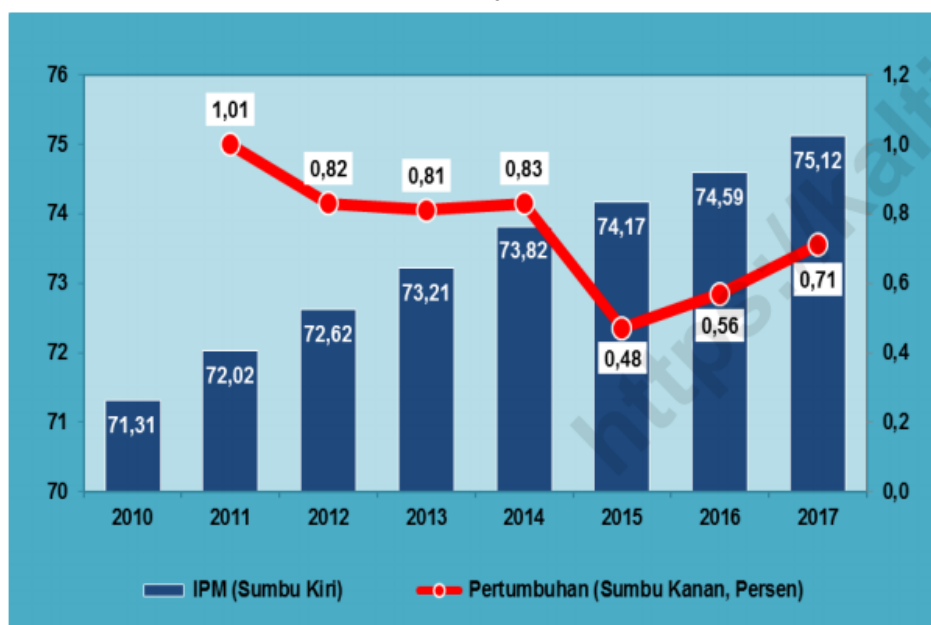
2014, yang juga naik menjadi 73,82 persen dengan rincian komponennya adalah UHH 73,62 tahun, HLS 13,17 tahun, RLS 9,04 tahun, dan pengeluaran per kapita disesuaikan senilai Rp 11.019.000.(BPS provinsi Kalimantan Timur, diakses dari <http://kaltim.bps.go.id/IPM-antar-Provinsi-Kalimantan-2010-2017>, pada tanggal 22 Oktober 2018.)

Gambar 1.2: IPM kab/kota di Kaltim tahun 2010-2016

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Growth (%)
Paser	66,54	67,11	68,18	69,61	69,87	70,30	71,00	1,00
Kutai Barat	65,90	66,92	67,14	68,13	68,91	69,34	69,99	0,94
Kutai Kartanegara	67,45	68,47	69,12	70,71	71,20	71,78	72,19	0,57
Kutai Timur	66,94	67,73	68,71	69,79	70,39	70,76	71,10	0,48
Berau	69,16	70,43	70,77	72,02	72,26	72,72	73,05	0,45
Penajam Paser Utara	66,37	66,92	67,17	68,07	68,80	69,26	69,96	1,01
Mahakam Ulu	n/a	n/a	n/a	63,81	64,32	64,89	65,51	0,96
Balikpapan	75,55	76,02	76,56	77,53	77,93	78,18	78,57	0,50
Samarinda	75,85	77,05	77,34	77,84	78,39	78,69	78,91	0,28
Bontang	76,97	77,05	77,55	78,34	78,58	78,78	78,92	0,18
Kalimantan Timur	71,31	72,02	72,62	73,21	73,82	74,17	74,59	0,57

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, diakses dari <http://kaltim.bps.go.id/IPM-kab/kota-di-Kaltim-tahun-2010-2016>, pada tanggal 2 Januari 2018.

Gambar 1.3: IPM dan Pertumbuhan IPM Kalimantan Timur Tahun 2010-2017



Sumber : BPS provinsi Kalimantan Timur, diakses dari <http://kaltim.bps.go.id/IPM-antar-Provinsi-Kalimantan-2010-2017>, pada tanggal 22 Oktober 2018.

Secara rinci, terdapat peningkatan untuk setiap komponen penyusun IPM Kaltim. Pada tahun 2017, aspek kesehatan penduduk, yang ditunjukkan oleh indikator angka harapan hidup, mencapai usia 73,70 tahun. Variable pendidikan yang diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah juga

mengalami peningkatan. Angka Harapan Lama Sekolah tercatat sebesar 13,49 tahun, lebih tinggi dibandingkan angka tahun 2016 yaitu 13,35 tahun. Peningkatan juga terlihat pada indikator pendidikan lainnya, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah. Dari 9,24 tahun pada tahun 2016, meningkat menjadi 9,36 tahun pada 2017. Aspek ekonomi masyarakat diukur dengan indikator pengeluaran per kapita Kaltim sebesar 11,6 juta rupiah/tahun, dimana angka tersebut lebih besar dibandingkan tahun 2016, yaitu sebesar 11,35 juta rupiah/tahun.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS setiap kelompok umur. Informasi ini sangat bermanfaat untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu. APS di Kalimantan Timur pada tahun 2016 untuk kelompok usia 7-12 tahun sebesar 99,54 persen, usia 13-15 tahun sebesar 98,18 persen dan usia 16-18 tahun sebesar 80,81 persen.

Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya. APM tahun 2016 di Kalimantan Timur untuk jenjang pendidikan SD sebesar 97,13 persen, SLTP sebesar 79,20 persen dan SLTA sebesar 67,92 persen. Informasi ini berguna untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya.

Menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dengan usia penduduk 15 tahun ke atas, tamat SLTA dan tidak melanjutkan pendidikan lagi sebanyak 36,19 persen. Tingkat pendidikan ini yang paling dominan dibanding tingkat pendidikan lainnya, tidak mempunyai ijazah sebesar 10,08 persen, SD/MI sebanyak 26,96 persen, SLTP 16,57 persen dan perguruan tinggi hanya sebesar 10,20 persen (termasuk yang tamat DI/II/III).

Keikutsertaan pendidikan pra sekolah untuk anak usia 0-6 tahun yang masih atau pernah mengikuti pra sekolah tahun ajaran 2015/2016 sebesar 17,97 persen. Sedangkan yang pernah mengikuti pendidikan pra sekolah pada tahun ajaran 2014/2015 dan sebelum tahun ajaran 2014/2015 sebanyak 10,35 persen. Sementara yang tidak atau belum pernah mengikuti pendidikan pra sekolah sebanyak 71,67 persen. Dari sekian banyak anak usia 0-6 tahun yang pernah/ sedang mengikuti pendidikan pra sekolah, sebesar 70,55 persen pendidikan pra sekolah dilakukan di Taman Kanak-Kanak (TK).

Proses peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang pada gilirannya merupakan modal investasi manusia bagi kepentingan pembangunan daerah, bahkan sampai pada tingkat nasional. Pembangunan pendidikan yang masih menempati posisi penting dalam skala prioritas ini akan terus ditingkatkan, program wajib belajar 9 tahun bagi pendidikan dasar terus digalakkan sehingga diharapkan seluruh anak-anak usia sekolah di Kalimantan Timur minimal dapat memasuki jenjang pendidikan dasar.

Apabila dibandingkan dengan IPM provinsi lain di Pulau Kalimantan, hanya Kalimantan Timur yang masuk ke dalam kategori tinggi, sedangkan provinsi lain baru sampai pada kategori sedang. Secara mengejutkan provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda berada di posisi kedua IPM tertinggi dengan nilai indeks sebesar 69,20 persen. IPM Kalimantan Timur juga lebih tinggi dari IPM tingkat nasional yang berada pada 70,18 persen. (BPS provinsi Kalimantan Timur, diakses dari <http://kaltim.bps.go.id/IPM-antar-Provinsi-Kalimantan-2010-2017>, pada tanggal 22 Oktober 2018.)

Mutu pendidikan juga menjadi salah satu indikator Pembangunan Manusia Kalimantan Timur. Mutu pendidikan di Kalimantan Timur sudah merata hingga seluruh wilayah Kaltim. Indikatornya terlihat dari keberhasilan pendidikan seperti rata-rata nilai ujian nasional maupun prestasi di berbagai lomba keterampilan siswa. Hasil ujian nasional siswa yang sudah merata di seluruh Kabupaten/Kota. Nilai tertinggi tidak lagi didominasi sekolah di perkotaan, tapi juga sekolah di pedalaman dan kawasan perbatasan Kaltim. Kondisi tersebut menunjukkan tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional mewujudkan pemerataan pendidikan. Program-program penunjang peningkatan mutu pendidikan akan terus dilanjutkan. Baik program peningkatan kapasitas guru, maupun program Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) yang akan terus dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kaltim 2013 sampai tahun 2018.

Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Northern Territory dalam bidang pendidikan dan pelatihan vokasional melalui program *Vocational Education Training* memiliki progres yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur. Dengan adanya Kerjasama ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga mampu menciptakan Sumber Daya Manusia yang mampu bersaing di tingkat global.

2. Tingkat Kemiskinan

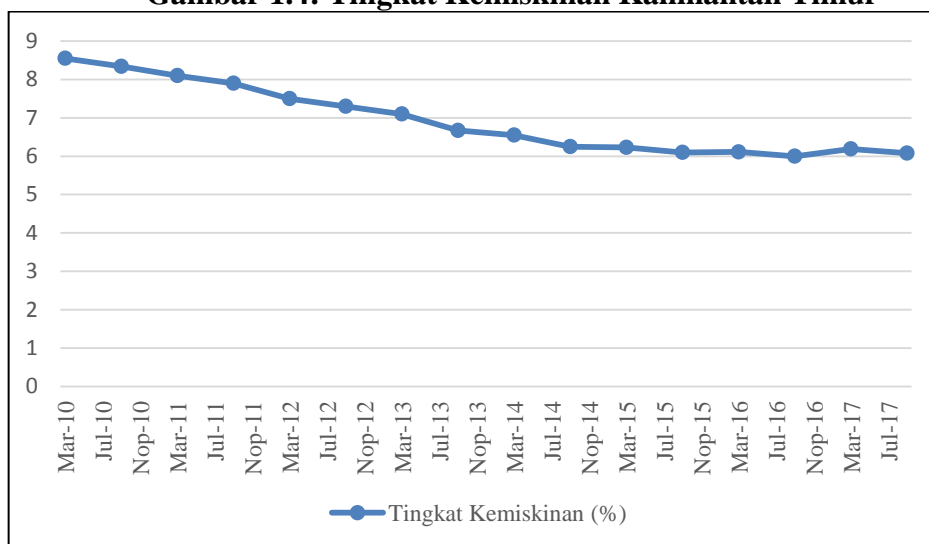
Tingkat kemiskinan pada maret tahun 2010 berada pada tingkat angka 8,55 persen, pada September tahun 2010 mengalami penurunan berada pada angka 8,34 persen, pada Maret tahun 2011 mengalami penurunan berada pada angka 8,1 persen, pada September tahun 2011 mengalami penurunan berada pada angka 7,9 persen, pada Maret 2012 mengalami penurunan berada pada angka 7,5 persen, pada September 2012 mengalami penurunan berada pada tingkat 7,3 persen, pada Maret tahun 2013 mengalami penurunan berada pada tingkat 7,1 persen, pada September 2013 mengalami penurunan berada pada tingkat 6,67 persen, pada Maret tahun 2014 mengalami penurunan berada pada tingkat 6,55 persen, pada September 2014 mengalami penurunan berada pada tingkat 6,25 persen, pada Maret tahun 2015 mengalami penurunan berada pada tingkat 6,23 persen, pada September 2015 mengalami penurunan berada pada tingkat 6,1 persen, pada Maret tahun 2016 mengalami peningkatan berada pada tingkat 6,11 persen, kemudian mengalami penurunan kembali pada September tahun 2016 berada pada tingkat 6 persen. (BPS provinsi Kalimantan Timur, diakses dari

<http://kaltim.bps.go.id/Tingkat-Kemiskinan-Kalimantan-Timur>, pada tanggal 22 Oktober 2018.)

Tingkat kemiskinan pada September tahun 2017 berada pada angka 6,08 persen, sedikit di bawah target RPJMD 2013-2018 yang ditetapkan sebesar 6,10 persen. Tingkat kemiskinan menurun 0,09 persen atau berkurang 1,5 ribu orang dibanding periode Maret 2017. Perkembangan tersebut menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin dari semula sebanyak 220,17 ribu jiwa menjadi 218,67 ribu jiwa. Selain itu garis kemiskinan di Kaltim mengalami kenaikan sebesar 4,06 persen dari Rp548.094 per kapita di bulan Maret 2017 menjadi Rp561.868 di bulan September 2017. Pendidikan yang masih sangat rendah, data BPS mengemukakan bahwa 76 persen tenaga kerja yang berada di sektor pertanian masih lulusan Sekolah Dasar (SD).

Hal ini menjadikan sektor pertanian masih dikelola secara tradisional sehingga produksi pertanian juga tidak akan bisa naik signifikan. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya penduduk miskin keluar dari kemiskinan yang melanda. Selain persentase dan jumlah penduduk miskin, indikator kesejahteraan juga harus memperhatikan Indeks Kedalaman Kemiskinan, yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan yaitu gambaran mengenai kesenjangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin. Semakin rendah angka indeks, menunjukkan kondisi yang lebih baik.

Gambar 1.4: Tingkat Kemiskinan Kalimantan Timur



Sumber : BPS provinsi Kalimantan Timur, diakses dari <http://kaltim.bps.go.id/Tingkat-Kemiskinan-Kalimantan-Timur>, pada tanggal 22 Oktober 2018.

Kenaikan tersebut lebih rendah dari kenaikan garis kemiskinan nasional yang mencapai 3,39 persen. Penurunan angka kemiskinan ini lebih disebabkan karena ekonomi Kalimantan Timur yang terus tumbuh sehingga pendapatan yang diperoleh masyarakat miskin juga mengalami kenaikan. Perekonomian Kalimantan Timur saat ini banyak disokong oleh sektor-sektor modern seperti

pertambangan, industri pengolahan, konstruksi dan lainnya. Bahkan, sektor pertambangan dan turunannya berkontribusi lebih dari 50 persen pada struktur ekonomi Kalimantan Timur. Sementara itu sektor pertanian yang merupakan sektor pertanian seperti terlupakan dan menyumbang penduduk miskin terbanyak, menurut data BPS hampir 67 persen penduduk miskin berada di sektor pertanian. Hal ini juga diperparah dengan tingkat pendidikan yang masih sangat rendah, data BPS mengemukakan bahwa 76 persen tenaga kerja yang berada di sektor pertanian masih lulusan Sekolah Dasar (SD). (BPS provinsi Kalimantan Timur, diakses dari <http://kaltim.bps.go.id/Tingkat-Kemiskinan-Kalimantan-Timur>, pada tanggal 22 Oktober 2018.)

Hal ini menjadikan sektor pertanian masih dikelola secara tradisional sehingga produksi pertanian juga tidak akan bisa naik signifikan. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya penduduk miskin keluar dari kemiskinan yang melanda. Selain persentase dan jumlah penduduk miskin, indikator kesejahteraan juga harus memperhatikan Indeks Kedalaman Kemiskinan, yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan yaitu gambaran mengenai kesenjangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin. Semakin rendah angka indeks, menunjukkan kondisi yang lebih baik.

Gambar 1.5: Indeks Keparahan Kemiskinan Kaltim

No.	Tahun	Persen
1.	2010	2,21 persen
2.	2011	2,08 persen
3.	2012	1,88 persen
4.	2013	1,47 persen
5.	Maret 2014	1,75 persen
6.	September 2014	0,793 persen
7.	Maret 2015	0,904 persen
8.	September 2015	0,693 persen
9.	Maret 2016	1,044 persen
10.	September 2016	0,808 persen
11.	Maret 2017	0,885 persen
12.	September 2017	0,874 persen

Sumber : BPS provinsi Kalimantan Timur, diakses dari <http://kaltim.bps.go.id/Indeks-Keparahan-Kemiskinan-Kaltim>, pada tanggal 2 Januari 2018.

Pada bulan September 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,011 persen dari Maret 2017 menjadi 0,874. Kondisi ini menunjukkan kedalaman kemiskinan sedikit berkurang karena rata-rata pengeluaran penduduk miskin meningkat, lebih mendekati garis kemiskinan, sehingga lebih dekat untuk keluar dari kategori miskin. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan juga turun dari 0,208 di bulan Maret menjadi 0,187 pada bulan September 2017. Hal ini mengindikasikan kondisi tingkat keparahan kemiskinan semakin berkurang karena ketimpangan pengeluaran di antara

sesama penduduk miskin sedikit dapat dikurangi. Kerjasama Pemprov Kaltim dengan Pemerintah Northern Territory dalam bidang pendidikan dan pelatihan juga memiliki peran penting dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan meningkatkan mutu pendidikan dan juga memberikan pelatihan-pelatihan dalam bidang kewirausahaan, sehingga lulusan Politeknik mempunyai bekal ilmu untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan mampu mengurangi angka pengangguran. (BPS provinsi Kalimantan Timur, diakses dari <http://kaltim.bps.go.id/Indeks-Keparahan-Kemiskinan-Kaltim>, pada tanggal 2 Januari 2018.)

3. Ketimpangan (*Gini Ratio*)

Tingkat Ketimpangan atau Kesenjangan Kesejahteraan antar penduduk yang diukur dengan indeks *Gini Ratio* pada tahun 2017 tercatat makin meningkat pada beberapa periode pengukuran.

Kenaikan tersebut dimulai pada September 2016 yang meningkat 0,008 poin menjadi 0,328. Kemudian kembali meningkat 0,002 poin ke indeks 0,330 pada bulan Maret 2017 dan mencapai angka 0,333 pada bulan September 2017. Kenaikan *Gini Ratio* ini terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi yang juga semakin meningkat.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis *Gini Ratio* yang berpengaruh terhadap Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Kaltim, pada Maret 2017 tercatat sebesar 0,330. Angka ini naik 0,002 poin bila dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2016, sebesar 0,328. ketimpangan pengeluaran di daerah perkotaan pada Maret 2017 tercatat sebesar 0,323. Sementara *Gini Ratio* di daerah perdesaan sebesar 0,298. pada skala nasional, kenaikan pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah, 40 persen menengah, lebih cepat dibanding penduduk kelompok 20 persen teratas. Pada Maret 2017, distribusi pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah sebanyak 20,02 persen. *Gini Ratio* di kota lebih buruk dibanding desa. Karena gap antara masyarakat bawah dan atas di kota, tecermin di *Gini Ratio* perkotaan yang jauh lebih besar dibandingkan *Gini Ratio* perdesaan.

Sementara itu, di tingkat nasional, angka kemiskinan di Indonesia tersebut diukur dalam *Gini Ratio* per Maret 2017 sebesar 0,393, relatif stagnan dibandingkan *Gini Ratio* pada September 2016 yang mencapai 0,394 atau turun tipis 0,001 poin. Per Maret 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,7 juta bertambah 6.900 orang dibandingkan dengan September 2016 yang sebesar 27,76 juta. *Gini Ratio* merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antara penduduk miskin dan penduduk kaya.

Menurut BPS, jika menggunakan skala 1 sampai 10, penduduk yang tergolong dalam kelas menengah merupakan masyarakat yang berada di level 6, 7, dan 8 dengan rata-rata pengeluaran setiap bulannya mencapai Rp 5 juta. saat ini rata-rata pertumbuhan kelas menengah di Indonesia bisa mencapai lebih dari 3 persen, sementara pertumbuhan penduduk kaya dan penduduk miskin rata-rata hanya mencapai 2 persen. Saat ini terdapat 37 juta rumah tangga yang tergolong

sebagai masyarakat kelas menengah atau sekitar 60 persen dari total penduduk di Indonesia.

4. Kondisi Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2010 berada pada tingkat 10,45 persen, pada Agustus 2010 mengalami penurunan pada tingkat 10,10 persen, kemudian mengalami peningkatan pada Februari 2011 pada tingkat 10,90 persen, kemudian mengalami peningkatan pada Agustus 2011 pada tingkat 11,43 persen, kemudian mengalami penurunan pada Februari 2012 pada tingkat 9,48 persen, dan mengalami penurunan kembali pada Agustus 2012 pada tingkat 9,02 persen, kemudian mengalami penurunan kembali pada Februari 2013 pada tingkat 8,94 persen, kemudian mengalami penurunan pada Agustus 2013 pada tingkat 7,95 persen, dan pada Februari 2014 mengalami peningkatan pada tingkat 8,89 persen, dan mengalami penurunan kembali pada Agustus 2014 pada tingkat 7,38 persen. (BPS Kalimantan Timur, diakses dari <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/15/981/tingkat-pengangguran->, pada tanggal 23 Oktober 2018.)

Pada Februari 2015 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan pada tingkat 7,17 persen, kemudian kembali mengalami peningkatan pada Agustus 2015 pada tingkat 7,50 persen, kemudian kembali mengalami peningkatan pada Februari 2016 pada tingkat 8,86 persen, kemudian mengalami penurunan pada Agustus 2016 pada tingkat 7,95 persen, kemudian mengalami peningkatan pada Februari 2017 pada tingkat 8,55 persen, dan kembali mengalami penurunan pada Agustus 2017 pada tingkat 6,91 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2018 menjadi 6,90 persen atau sekitar 114,29 ribu dari 1,65 juta orang angkatan kerja. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sejumlah angkatan kerja tersebut proporsi penduduk yang bekerja ada sebesar 93,09 persen, dan sisanya adalah pengangguran. Pada kelompok bukan angkatan kerja, mengurus rumah tangga memiliki proporsi yang paling besar yaitu mencapai 65,04 persen.

Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan persentase jumlah Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja. Tahun 2017, TPAK Kaltim sebesar 63,75, dengan nilai TPAK laki-laki hampir dua kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPAK perempuan.

Dalam bidang ketenagakerjaan TPT dan pekerja sektor informal maupun informal menjadi indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke 8 (delapan), yaitu terkait pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. TPT menggambarkan angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Pada tahun 2017, TPT Kaltim sebesar 6,91, artinya dari 100 orang angkatan kerja ada sekitar 7 orang yang menganggur. Jika dirinci menurut jenis kelamin, nilai TPT perempuan lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT laki-laki. Semakin kecil nilai TPT, maka mengindikasikan penyerapan tenaga kerja yang semakin baik. Berdasarkan sektor tenaga kerja yang laki-laki yang bekerja di sektor formal lebih tinggi jika dibandingkan yang bekerja di sektor informal.

Penurunan TPT pada bulan Agustus 2017 sudah mampu memenuhi target Tingkat Pengangguran yang ditetapkan di RPJMD sebesar 7,60 persen, tetapi masih jauh di atas Tingkat Pengangguran Nasional sebesar 5,50 persen.

Hubungan Kerjasama Pemprov Kalimantan timur dan Northern Territory dalam berbagai bidang semakin meningkat setiap tahunnya khususnya dalam bidang pendidikan untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia, dan juga memiliki daya saing untuk menghadapi persaingan global. Hubungan antara Pemprov Kalimantan timur dan Northern Territory mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Baik Kaltim maupun Northern Territory telah berusaha untuk memperkuat hubungan diantara keduanya dan mengembangkan hubungan dalam berbagai bidang melalui program-program kerjasama yang telah disepakati.

Gambar 1.6: Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka 2010-2018

No.	Tahun	Persen (%)
1	February 2010	10,45 persen
2	Agustus 2010	10,10 persen
3	February 2011	10,90 persen
4	Agustus 2011	11,43 persen
5	February 2012	9,48 persen
6	Agustus 2012	9,02 persen
7	February 2013	8,94 persen
8	Agustus 2013	7,95 persen
9	February 2014	8,89 persen
10	Agustus 2014	7,38 persen
11	February 2015	7,17 persen
12	Agustus 2015	7,50 persen
13	February 2016	8,86 persen
14	Agustus 2016	7,95 persen
15	February 2017	8,55 persen
16	Agustus 2017	6,91 persen
17	February 2018	6,90 persen

Sumber: BPS Kaltim, diakses dari <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/15/981/tingkat-pengangguran->, pada tanggal 23 Oktober 2018.

Kesimpulan

Kerjasama Pemprov Kaltim dan Northern Territory Dalam Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Vokasional Melalui Program *Vocational Education Training* (VET) tahun 2010 berhasil dijalankan. Kerjasama Pemprov Kaltim dan Northern Territory Dalam Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Vokasional Melalui Program *Vocational Education Training* (VET) memberikan dampak positif yang cukup besar bagi pertumbuhan Ekonomi, Politik, Keamanan, Sosial, Budaya, terutama dalam bidang pendidikan *Vocational*.

Kerjasama ini mampu meningkatkan stabilitas keamanan kawasan, minimnya konflik diantara keduanya setelah adanya peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan, mampu meningkatkan perasaan untuk saling memahami budaya (*Cultural Understanding*), yaitu dilihat dari adanya peningkatan kegiatan kerjasama diantara keduanya dalam bidang sosial (kegiatan sosial kemasyarakatan), kesenian, dan kebudayaan, dan juga mampu meningkatkan nilai ekonomi dari aktifitas layanan pendidikan diantara keduanya, dan mampu meningkatkan kegiatan perdagangan diantara keduanya.

Hubungan Kerjasama Pemprov Kalimantan Timur dan Northern Territory dalam berbagai bidang meningkat setiap tahunnya khususnya dalam bidang pendidikan untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia, dan juga memiliki daya saing untuk menghadapi persaingan global. Hubungan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Northern Territory dalam berbagai bidang tetap tinggi, terutama dalam bidang pendidikan. Hal tersebut merupakan aset penting dalam hubungan keduanya yang perlu terus dijalin dan dikembangkan, sehingga diharapkan akan memainkan peran penting dalam peningkatan hubungan kerjasama ini.

Daftar Pustaka

Buku

Criekemans, David, 'Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?', hal. 34, University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy, Belgium, July 2008.

Lecours, André, 'Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World', hal. 1, Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael', December 2008.

Mas'ood, Mohtar, DR, 'Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi', hal. 271-274, LP3ES, Jakarta, Tahun 1990.

Wolff, Stefan, 'Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges', hal. 1-2, dan 13, University of Nottingham, 2009.

Jurnal

Subsidiary Arrangement Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia Relating to Australia's Education Partnership With Indonesia Contribution to the Education Sector Support Program.

Internet

Wolff, Stefan. 2007. Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges dalam The Bologna Center Journal of International Affairs. vol. 10 (Spring 2007). Universitas Nottingham. Tersedia di <http://www.stefanwolff.com/files/Paradiplomacy.pdf>.

BPS Provinsi Kalimantan Timur, IPM kab/kota di Kaltim tahun 2010-2016. Tersedia di <http://kaltim.bps.go.id/IPM-kab/kota-di-Kaltim-tahun-2010-2016>, pada tanggal 2 Januari 2018.

BPS provinsi Kalimantan Timur, IPM dan Pertumbuhan IPM Kalimantan Timur Tahun 2010-2017. Tersedia di <http://kaltim.bps.go.id/IPM-antar-Provinsi-Kalimantan-2010-2017>, pada tanggal 22 Oktober 2018.

BPS provinsi Kalimantan Timur, Tingkat Kemiskinan Kalimantan Timur. Tersedia di <http://kaltim.bps.go.id/Tingkat-Kemiskinan-Kalimantan-Timur>, pada tanggal 22 Oktober 2018.

BPS provinsi Kalimantan Timur, Indeks Keparahan Kemiskinan Kaltim. Tersedia di <http://kaltim.bps.go.id/Indeks-Keparahan-Kemiskinan-Kaltim>, pada tanggal 2 Januari 2018.

BPS Kaltim, Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka 2010-2018. Tersedia di <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/15/981/tingkat-pengangguran->, pada tanggal 23 Oktober 2018.